



BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012

A. Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2012

Di negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan merupakan satu dari sekian banyak masalah yang terus saja “menghantui”. Pengentasan kemiskinan selalu menjadi konsentrasi utama baik pemerintah pusat maupun di daerah. Berbagai paket program telah disiapkan mulai yang sifatnya instan dan cepat seperti Bantuan Langsung Sementara Mandiri (BLSM), Bantuan Beras Miskin (Raskin) maupun yang sifatnya berkesinambungan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain.

Paket kebijakan yang dikeluarkan baik dari pusat dalam hal ini adalah Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Jaminan Sosial dan Bantuan Jaminan Sosial Departemen sosial, maupun dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Paket kebijakan pengentasan kemiskinan yang telah di buat sedemikian rupa yang bertujuan untuk segera menurunkan angka kemiskinan dan mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat, kadang kala menjadi tidak berjalan dan tidak tepat sasaran ketika sebuah program di implementasikan dalam bentuk nyata di tengah-tengah masyarakat:

Berkaitan dengan Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di

Pertama, dilakukan pendataan sasaran (warga miskin, setengah miskin dan rentan miskin) untuk mengetahui jumlah yang pasti agar program benar-benar tepat sasaran dan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Bantul. *Kedua*, dilakukan proses sosialisasi program pengentasan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul bersama Tim Pelaksana lapangan kepada masyarakat/warga yang dinilai menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan itu sendiri. *Ketiga*, setelah proses sosialisasi berjalan dilakukan penyaringan bagi warga yang telah mengajukan bantuan untuk dipilih dan ditetapkan sebagai warga penerima bantuan baik sifatnya perorangan maupun kelompok (*community*). *Keempat*, pemberian bantuan baik berbentuk material maupun bimbingan dari tim pelaksana lapangan sampai akhirnya dilakukan *monitoring*.

Implementasi program pengentasan kemiskinan khususnya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan. *Pertama*, bagaimana komunikasi dimainkan dalam upaya sosialisasi program, sumber daya yang menjadi unsur pelaksana dan bahan utama, sikap pelaksana yang difungsikan sebagai panduan operasional teknis serta struktur birokrasi yang sama pentingnya dengan indikator-indikator lainnya. Untuk mengupayakan agar sosialisasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan dengan baik, Dinas Sosial Kabupaten Bantul melakukan beberapa cara komunikasi baik langsung maupun tidak

maupun elektronik. Berikut langkah sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul agar masyarakat Bantul khususnya warga miskin mendapat informasi yang baik terkait program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

1. Komunikasi

Komunikasi yang kemudian masuk dalam tahapan sosialisasi merupakan *fase* yang penting dalam sebuah pelaksanaan program kerja. Tahapan sosialisasi biasanya bertujuan agar objek dan subjek satu program dipahami secara jelas, apa saja bentuk, cara, dan hal lain dari program itu sendiri. Dalam tahapan sosialisasi komunikasi adalah salah satu bagian yang amat penting dan menjadi modal utama, baik komunikasi secara langsung, *face to face* maupun komunikasi melalui media masa atau iklan publik. Berikut komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul serta Tim Teknis Lapangan di Kabupaten Bantul guna menginformasikan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

a. Komunikasi/Sosialisasi Melalui Media masa.

Sebagai upaya efektifitas implementasi program pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul dalam hal ini adalah sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH). Dinas Sosial Kabupaten Bantul melakukan komunikasi dan sosialisasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Adapun media yang digunakan yaitu radio dan

... Radio dipilih karena hampir 56% penduduk Kabupaten Bantul

dapat mengakses siaran radio di mana saja. Selain itu juga radio dianggap media yang relatif murah dari segi iklan dan promosi.

“komunikasi melalui media cetak dan elektronik yaitu surat kabar “ADA” dan “Bantul” Radio yang dilakukan hanya satu kali dalam satu periode sudah cukup membantu proses Program Keluarga Harapan (Hasil wawancara Bersama ketua Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Ibu Rs. Rahayu Martiningtyas, SH 3 Maret 2014).

Selain radio media masa pun menjadi tempat yang penting untuk mengupayakan komunikasi dalam pelaksanaan Program pengentasan kemiskinan. Surat kabar menjadi media yang dapat digunakan dalam proses sosialisai program tersebut. Untuk koran yang dipakai dalam sosialisasi PKH dan KUBE adalah Majalah “ADA” serta siaran radio menggunakan “Bantul” Radio.

Berikut media massa yang digunakan dalam upaya mengkomunikasikan program pengentasan kemiskinan khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Tabel 3.1

Media Masa yang digunakan Untuk Sosialisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

No	Nama Media Massa	Jenis	Acara/Rubrik	Volume
1	Majalah “ADA”	Cetak	Umum	1 x / Tahun
2	Bantul Radio	Elektronik	Umum	1 x/ Tahun

Sumber : Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kabupaten Bantul 2014.

Sosialisasi Media Massa dan Elektronik berhasil dijalankan

Tabel 3.2

**Proses Sosialisasi Media, Massa dan Elektronik Program
Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul 2012.**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	7	23
2.	Baik	23	77
3.	Kurang baik	0	0
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil Penelitian Tahun 2014.

Dari hasil koesioner yang diberikan kepada 30 responden menyatakan bahwa sosialisasi melalui media massa dan elektronik berjalan dengan “Baik” 77%, dan “Sangat Baik” 23%. Masyarakat di Kabupaten Bantul dengan mudah mengakses siaran radio serta membaca majalah pada proses sosialisasi tersebut.

Tabel 3.3

**Proses Sosialisasi Media, Massa dan Elektronik Program
Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bantul 2012.**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	3	10
2.	Baik	26	87
3.	Kurang baik	1	3
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil Penelitian Tahun 2014.

Tabel diatas menunjukkan frekuensi terbanyak pada sosialisasi media massa dan elektronik program kelompok usaha bersama berada pada kategori baik. Yaitu dengan jumlah frekuensi 26% kemudian kategori sangat baik dengan frekuensi 3% dan frekuensi kategori kurang baik 1% sedangkan kategori tidak baik memiliki frekuensi 0%

sehingga dapat dinyatakan bahwa proses sosialisasi media massa dan elektronik program Kelompok Usaha Bersama terlaksana dengan baik.

b. Komunikasi/ Sosialisasi Melalui Pengurus Desa

Target dan sasaran dari program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul dalam hal ini ialah rumah tangga sasaran (Miskin, Setengah Miskin dan Sangat Miskin) yang sebagian besar berada di desa, maka Dinas sosial Kabupaten Bantul melakukan komunikasi dan sosialisasi yang *intens* kepada perangkat desa agar dapat mengetahui kondisi warganya sebagai katagori rumah tangga sasaran (Miskin, Setengah Miskin dan Sangat Miskin).

Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Batuan Jaminan Sosial Bapak Slamet Indarto, SH tentang Penanggulangan Rumah Tangga Miskin (Wawancara Tanggal 3 Maret 2014):

“Kami telah mengundang seluruh kepala desa, lurah, ketua dukuh, kelompok usaha, RW dan RT bahkan Ormas, akademisi bahkan Lsm untuk berperan aktif mengkomunikasikan program ini agar program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran dan diketahui warga yang memang membutuhkan”

Komunikasi dan sosialisasi secara bergiliran dari semua Kecamatan di Kabupaten Bantul sudah terlaksana dan berjalan lancar walaupun hasilnya belum maksimal. Dimulai dari kecamatan Jetis sampai yang terakhir Sedayu. Komunikasi dan sosialisasi ini dilaksanakan berupa pertemuan pengurus desa dan pedukuhan setelah Pemerintah Pusat mengusulkan Program PKH dan KUBE. Penyuluhan

penduduk atau peserta program untuk segera melakukan pendataan, siapa yang berhak menerima dan ingin mengajukan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Komunikasi antar staf Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan pengurus desa berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Sosialisasi pertemuan besar antara pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten, Perangkat Desa serta utusan dari Masyarakat hanya dilakukan satu kali dalam satu periode sedangkan sosialisasi pertemuan antara peserta dengan tim pendamping dilakukan sebulan 2 kali.

“Kami melakukan Sosialisasi ke RTSM, Servis Provider (Kader Posyandu, Kepala Sekolah dan Ketua Puskesmas) satu periode satu kali”. Hasil wawancara dengan Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Ibu Rs.Rahayu Martiningtyas, SH (3 Maret 2014).

Dari hasil koesioner yang disebarakan peneliti ke-30 orang responden telah membuktikan bahwa sosialisasi di Pengurus Desa berjalan dengan baik, data tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4

Proses Sosialisasi Oleh Pengurus Desa Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	13	43
2.	Baik	17	57
3.	Tidak baik	0	0
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Dari hasil koesioner tersebut menjelaskan bahwa 57% responden menyatakan proses Sosialisasi yang dilakukan oleh Pengurus Desa berjalan dengan baik dan 43% responden menjawab sangat baik. Hal ini terjadi karena peran pelaksana yang menjalankan tugas dengan baik serta memberikan koordinasi yang kuat di lapangan.

Tabel 3.5

Proses Sosialisasi Oleh Pengurus Desa Program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bantul 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	7	23
2.	Baik	23	77
3.	Tidak baik	0	0
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil Penelitian Tahun 2014.

Tabel diatas menunjukkan frekuensi terbanyak pada Proses Sosialisasi Oleh Pengurus Desa Program Kelompok Usaha Bersama berada pada kategori baik. Jumlah frekuensi Baik sebanyak 77% kemudian kategori Sangat Baik dengan frekuensi 23% sehingga dapat dinyatakan bahwa proses oleh pengurus desa program kelompok usaha bersama terlaksana dengan baik.

c. Komunikasi antara Staf di Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Komunikasi antar pegawai atau staf di Dinas Sosial dan tim teknis penanggung jawab (Fasilitator) Program Kelompok Usaha Bersama dan tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul telah dilakukan. Adapun proses komunikasi tersebut

Pengentasan Kemiskinan yaitu Bupati Kabupaten Bantul yang juga mendapat intruksi langsung dari Kementerian Sosial, dan meneruskan komunikasi kepada tim teknis penanggung jawab dan pendampingan di lapangan, setelah itu langsung diberikan kepada rumah tangga sasaran kebijakan yaitu keluarga miskin yang telah didata dan masuk dalam katagori penerima bantuan. Dinas sosial pun melakukan komunikasi kepada para fasilitator yaitu Tim Pendamping dari desa.

Setelah dilakukan komunikasi, tim teknis penanggung jawab dan Tim Pendamping yaitu menginformasikan ke tim fasilitator yang tersebar di Kabupaten Bantul. Informasi berupa sosialisasi cara teknis yang akan dilakukan dalam proses implementasi program Pengentasan kemiskinan khususnya Program Kelompok Usaha Bersama dan Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Komunikasi yang dibangun antar lini dalam tim teknis ini berjalan dengan baik. Pemahaman seluruh aparat dan tim pelaksana proses pelayanan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul terhadap informasi pelayanan pun sangat baik, antara tim teknis dengan tim teknis lain saling mengetahui informasi bagaimana proses pelayanan dan implementasi program pengentasan kemiskinan. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dilakukan dalam hal pengetahuan informasi pelayanan menunjukkan bahwa komunikasi

Tabel 3.6

Proses Penyampaian Informasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	12	40
2.	Baik	18	60
3.	Tidak baik	0	0
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil Penelitian Tahun 2014.

Komunikasi Program PKH yang dilakukan antar lini telah berjalan dengan baik, dalam hal ini adalah informasi pelayanan dari 30 responden yang menyatakan informasi pelayanan sangat baik adalah 40 %, dan baik 60%. Dalam penyampaian informasi Program PKH, pelaksana yaitu tim pembimbing dan pembina melakukan penyuluhan di setiap desa di Kabupaten Bantul agar masyarakat dapat mengerti Program Keluarga Harapan tersebut.

Tabel 3.7

Proses Penyampaian Informasi Program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bantul 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	12	40
2.	Baik	18	60
3.	tidak baik	0	0
4.	sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil Penelitian Tahun 2014.

Tabel diatas menunjukkan frekuensi terbanyak pada proses penyampaian informasi Program Kelompok Usaha Bersama berada

... dengan jumlah frekuensi 60% kemudian

kategori sangat baik dengan frekuensi 40 % sehingga dapat dinyatakan bahwa proses penyampaian informasi Program Kelompok Usaha Bersama terlaksana dengan baik. Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana berjalan dengan baik yaitu dimulai dari pelaksana Dinas Sosial ke pelaksana Lapangan atau Pendamping

Begitu juga dengan Pelaksana dan Tim Pendamping Program PKH terhadap proses alur sosialisasi, tugas dan tanggung jawab telah berjalan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan masing-masing tim dalam upaya tugas dan tanggung jawab masing-masing dipahami dengan baik, jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 3.8

Proses Alur Sosialisasi yang dijalankan Oleh Tim Pendamping dan Pembina Terhadap Program PKH di Kabupaten Bantul 2012

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	10	33
2.	Baik	20	67
3.	Tidak baik	0	0
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil penelitian Tahun 2014.

Dari hasil kuesioner di atas menunjukkan sebagian besar atau 67% responden mengatakan bahwa alur sosialisasi yang di komunikasi kan antar tim pelaksanaan Program PKH berjalan dengan Baik, Sangat baik 33%. Pelaksana lapangan atau Pendamping membentuk kelompok Program PKH di tiap Desa yaitu satu kelompok minimal 10 orang

sehingga alur sosialisasi berjalan dengan baik dan terarah

Tabel 3.9

Proses Alur Sosialisasi yang dijalankan Oleh Tim Pendamping dan Pembina Terhadap Program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bantul 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	12	40
2.	Baik	18	60
3.	Tidak baik	0	0
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil penelitian Tahun 2014.

Dari hasil kuesioner di atas menunjukkan sebagian besar atau 60% responden mengatakan bahwa alur sosialisasi yang di komunikasikan antar tim pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berjalan dengan baik, dan sangat baik 40%. Dalam program KUBE pelaksanaan alur sosialisasi sama seperti yang diterapkan pada Program PKH yaitu masing-masing Desa dibentuk perkelompok yaitu 10 orang peserta KUBE sehingga program dapat berjalan dengan baik.

Komunikasi yang dilakukan antar Tim Pembimbing dengan Pendamping program pengentasan kemiskinan khususnya pada Bagian Bantuan Jaminan Sosial, Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana di Kabupaten Bantul telah berjalan sesuai koridor atau alur komunikasi yang efektif.

Dalam pelaksanaan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul, sosialisasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya program pengentasan

kemiskinan. Mengingat waktu yang diberikan dalam mengsucceskan program ini cukup singkat maka dari hasil yang didapat oleh Tim pelaksana program pengentasan kemiskinan, setidaknya program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2012 telah tersosialisasi dengan baik dan telah terlaksana secara maksimal. Sosialisasi dan komunikasi yang efektif ini juga menjadi faktor pemicu besarnya animo masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan, adanya keterlibatan 85 Kelompok Usaha Bersama, serta 3164 Rumah Tangga yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

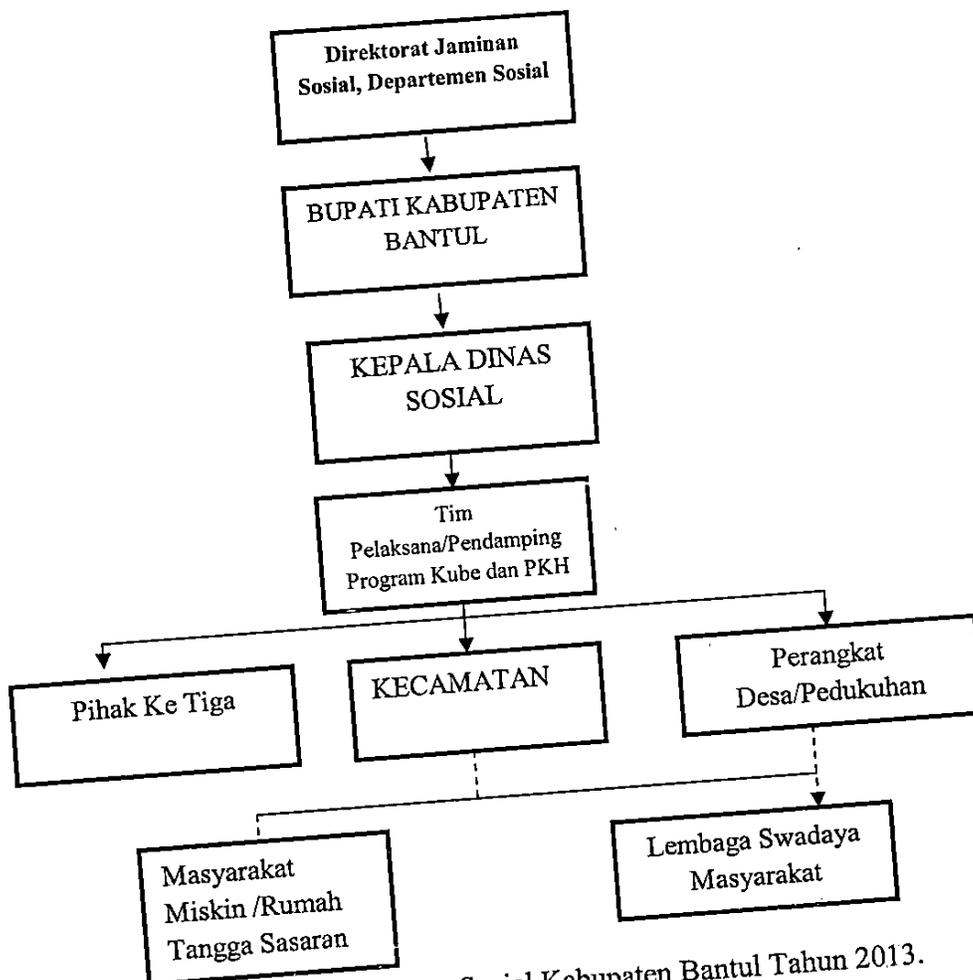
Berikut hasil wawancara terkait dengan Sosialisasi dan Komunikasi menurut Kepala Bidang Batuan Jaminan Sosial Bapak Slamet Indarto, SH (6 Maret 2014):

“Kami menyadari kalau sosialisasi dan komunikasi yang efektif sangat berpengaruh dengan kualitas implementasi program yang kami bangun. Cara kami membangun komunikasi yang efektif antar staf bermacam cara, seperti misalnya mengadakan outbone, dan training time work. Dengan cara ini kami mampu membangun komunikasi secara baik. (Slamet Indarto. SH, 5 Maret 2014)”

Berikut ini alur dan jalur komunikasi yang dilakukan mulai dari

Gambar 3.1

**Alur Komunikasi Program Pengentasan Kemiskinan
di Kabupaten Bantul Tahun 2012**



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2013.

Dari hasil penelitian di lapangan komunikasi yang dibangun antar lini berjalan pada koridor yang benar. Misalnya komunikasi Bupati Kabupaten Bantul selaku ketua dan penanggung jawab program pengentasan kemiskinan berjalan dengan efektif dan efisien hal ini terlihat dari kelancaran satu koordinasi yang tidak berbelit-belit dan langsung dapat direspon dan dijawab oleh kepala Dinas Sosial

berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan. Komunikasi dari kepala dinas kepada tim pelaksanaan dan tanggung jawab teknis pun berjalan cepat, petunjuk teknis yang di komunikasikan berjalan dengan baik tanpa ada sesuatu hal yang menjadi hambatan, walaupun ada kekurangan di beberapa tahapan dalam proses komunikasinya.

Komunikasi yang berjalan pun berjalan cukup baik. Tim Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga dilakukan pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek). Komunikasi Tim Pendamping dalam hal ini sangat *transformative* yaitu telah di komunikasikan apa saja yang menjadi jobdesknya, di mana batasan serta apa yang harus mereka kerjakan.

“Komunikasi yang kita bangun ke beberapa pihak sudah efektif dan efisien, hal ini terlihat karena memang tim pendamping telah dilatih secara teknis sehingga mereka dapat memudahkan proses sosialisasi. (Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Batuan Jaminan Sosial Bapak Slamet Indarto, SH 6 Maret 2014).

Komunikasi ditingkat masyarakat juga berjalan dengan baik dengan metode komunikasi personal. Tim sosialisasi dan komunikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melakukan komunikasi dengan masyarakat Bantul baik secara langsung *door to door* maupun dengan cara penyebaran media massa. Selain masyarakat RTSM yang antusias dalam mengikuti adanya Program PKH dan KUBE. Bukan hanya itu untuk menjadi Tim Pendamping Program PKH dan KUBE pun harus melewati seleksi

yang sangat ketat yang langsung dari KEMENSOS. Berikut Tim Pendamping Program PKH di Kabupaten Tahun 2012 :

Tabel 3.10

Tim Pendamping PKH Bantul Priode 1

NO	Nama	Tugas Kecamatan
1	Dias Christanti, AMd	Kec. Sewon
2	Suwanti, AMd	Kec. Sanden
3	Reni Purwanti, S.kep	Kec. Dlingo
4	Diah Irfaningrum, S.sos	Kec. Imogiri
5	Rini Natalina, SP	Kec. Kasihan
6	Yuni Arifah, SEI	Kec. Pandak
7	Dammar Asih Kuntari, S.sos	Kec. Pandak
8	Paryanti, S.Pt	Kec. Banguntapan
9	Erma Rohimah, A.Md	Kec. Banguntapan
10	Retna Heryanti, A.Md	Kec. Bambanglipuro
11	Natalia Dewi Aryani, S.sos	Kec. Bantul
12	Ratna Indrayani, S.Pd	Kec. Jetis dan Pleret
13	Dwi Sulistiyono, S.pd	Kec. Kretek dan Pundong
14	Umi Masruroh, S.pd	Kec. Pajangan dan Sedayu
15	Erni Rinawaty, Amd. Keb	Kec. Piyungan
16	Nanda Ari Nugraheni, Amd. Keb	Kec. Srandakan

Sumber: Buku Panduan Tim Pendamping PKH Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2014.

2. Sumber Daya

Indikator keberhasilan sebuah Implementasi sesuai Edward III berikutnya adalah sumber daya. Dalam hal ini sumber daya dibagi menjadi dua yaitu Pertama, sumber daya manusia (Staf Fungsional, Pegawai, Tim

a. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting dalam melaksanakan implementasi satu program dalam hal ini kaitannya dengan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Sumber daya manusia dapat dikatakan penting karena motor penggerak dari tujuan (goals) pelaksanaan satu kebijakan publik (*Public Policy*). Tanpa adanya sumber daya manusia yang baik (Profesional, Kredibel, Jujur, Disiplin) sebuah Instansi tidak dapat menjalankan program atau kebijakan dengan baik.

Kaitan dengan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentunya memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi. Di lingkungan Internal Dinas Sosial Kabupaten Bantul, memiliki 1 orang Kepala Dinas, dan 38 staf biasa, dan mulai Sekretaris sampai tenaga pembantu. Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan juga melakukan beberapa kerjasama kepada beberapa pihak ketiga seperti Posyandu, Lembaga Pendidikan, Wiraswasta serta Tim Pendamping.

Tabel 3.11

Kualitas Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	7	23
2.	Baik	22	73
3.	Tidak baik	0	0
4.	Sangat tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Pada hasil ini dapat dilihat kualitas pelaksana program PKH di Kabupaten Bantul berjalan dengan baik. Dari 30 responden 22 orang atau 73% mengatakan sikap pelayanan berjalan baik, sedangkan 7 orang dengan *persentase* 23% mengatakan sangat baik serta 3% mengatakan sangat tidak baik. Hal ini terjadi karena sistem perekrutan pegawai atau tim Pendamping yang sangat ketat yaitu minimal pendidikan D3 serta setiap satu periode Pendamping ini akan diberikan pelatihan khusus dari Pemerintah Daerah.

Tabel 3.12

Kualitas Pelaksana Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	2	7
2.	Baik	26	86
3.	Tidak baik	2	7
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber: Penelitian Tahun 2014.

Pada hasil ini dapat dilihat kualitas pelaksana program KUBE di Kabupaten Bantul berjalan dengan baik. Dari 30 responden 26 orang atau 86% mengatakan sikap pelayanan berjalan baik, sedangkan 2 orang dengan *persentase* 7% mengatakan sangat baik. Hal ini terjadi karena Tim Pendamping di pegang oleh Perangkat desa sehingga memiliki kualitas yang baik dan program dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Hasil wawancara yang menjelaskan tentang kualitas pelaksana

“Untuk mengoptimalkan implementasi program pengentasan kemiskinan, tentunya harus melibatkan semua stakeholder. Oleh karena itu atas intruksi kepala dinas, kami melakukan kerja sama kepada pihak ketiga seperti LSM, Perguruan Tinggi dll. Dengan begitu kami dapat terbantu dengan tenaga-tenaga teknis ini (Hasil wawancara: bersama Sub Bag. Umum Hermaningtyas YD,BA 3 Maret 2014).

Penambahan SDM dari pihak ketiga, Dinas Sosial Kabupaten Bantul melakukan seleksi Tenaga Pendamping (TP) Program PKH. Dalam proses Tenaga Pendamping (TP) yang dilakukan, kuantitas serta kualitas sumber daya manusia itu sendiri selalu di *monitoring*. KEMENSOS langsung yang melakukan seleksi dan memberikan persyaratan yang sangat ketat minimal harus D3 dalam merekrut sumber daya manusia tersebut. Tenaga Pendamping (TP) akan ditempatkan secara merata di setiap Kecamatan Kabupaten Bantul, untuk memastikan agar implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan berjalan sesuai yang diharapkan.

“Rekrutment Tim Pendamping di lakukan satu kali dalam satu periode dengan pendidikan minimal D3 untuk Program PKH sedangkan untuk Tim Pendamping KUBE ialah Perangkat Desa masing-masih Desa” hasil wawancara dengan Kepala Bidang Batuan Jaminan Sosial Bapak Slamet Indarto, SH Tanggal 3 Maret 2014.

Adapun jumlah SDM yang dimiliki Dinas Sosial secara internal ialah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Daftar SDM yang dimiliki Dinas Sosial dan Pihak Ketiga Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2013.

No	Instansi	Jumlah	Posisi	Keterangan
1	Dinas Sosial	39	Kepala Dinas sampai Tenaga Pembantu	Di Instansi

b. Sumber daya Material

Dalam konteks ini, sumber daya material adalah sumber daya yang dapat diartikan fasilitas dan sumber daya bantuan keuangan. Dari hasil penelitian dilapangan, bantuan dalam program kegiatan pengentasan kemiskinan berasal dari keuangan pusat dan daerah. Bentuk bantuannya pun ada bentuk bantuan uang tunai maupun pembimbingan usaha kecil. Bantuan pengentasan kemiskinan di tingkat pusat (APBN) berasal dari Kementerian Sosial, sedangkan dari daerah (APBD). Program pengentasan kemiskinan pun ada yang dari pusat seperti BLSM, PNPM Mandiri dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan adanya program pemerintah maka alokasi dana pun secara otomatis dari pemerintah pusat.

Konteks dalam penelitian ini, yang difokuskan pada dua program yakni, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH), lokasi dana yang disalurkan baik dari bantuan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dari setiap tahunnya sangat variatif namun mengalami peningkatan. Untuk program KUBE, setiap satu kelompok terdapat 10 orang dan jika memenuhi syarat yang ditentukan akan dibantu Bantuan 10-20 juta persatu

Tabel 3.14

Fasilitas yang diberikan dalam Program PKH di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	7	23
2.	Baik	21	70
3.	Tidak baik	0	7
4.	Sangat Tidak baik	2	3
Jumlah		30	100

Sumber: Penelitian Tahun 2014.

Pada hasil ini dapat dilihat fasilitas yang diberikan pelaksana program PKH di Kabupaten Bantul berjalan dengan baik. Dari 30 responden 21 orang atau 70% mengatakan sikap pelayanan berjalan baik, sedangkan 7 orang dengan *persentase* 23% mengatakan sangat baik serta 3% mengatakan sangat tidak baik.

Tabel 3.15

Fasilitas yang diberikan dalam Program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	2	7
2.	Baik	25	83
3.	Tidak baik	3	10
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber: Penelitian Tahun 2014.

Pada hasil *Tabel* diatas ini dapat dilihat fasilitas yang diberikan pada peserta program KUBE oleh pelaksana di Kabupaten Bantul berjalan dengan baik. Dari 30 responden 25 orang atau 83% mengatakan sikap pelayanan berjalan baik, sedangkan *persentase* 7% mengatakan

sangat baik serta 10% responden menjawab tidak baik

Alokasi dana yang diberikan dalam Program Kelompok Usaha Bersama dan Program Keluarga Harapan telah berjalan baik dan sesuai dengan kebutuhan, hal ini dapat dijelaskan pada hasil koesioner sebagai berikut:

Tabel 3.16

Dana yang diberikan dalam Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	21	70
2.	Baik	0	0
3.	Tidak baik	2	7
4.	Sangatb Tidak baik	30	100
Jumlah			

Sumber: Penelitian Tahun 2014.

Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat dilihat bahwa, dana yang diberikan dalam Program PKH di Kabupaten Bantul Tahun 2012 berjalan dengan baik suara responden 70% atau 21 orang dan 23% responden telah mengatakan dana yang diberikan pelaksana berjalan sangat baik serta 7% responden mengatakan tidak baik. Hal ini terjadi karena dana program langsung diberikan atau di transfer langsung ke rekening peserta.

Tabel 3.17

Dana yang diberikan dalam Program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	22	73
2.	Baik	3	10
3.	Tidak baik	0	0
4.	Sangat Tidak baik	30	100
Jumlah			

Sumber: Penelitian Tahun 2014.

Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat dilihat bahwa, dana yang diberikan dalam Program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bantul Tahun 2012 berjalan dengan baik suara responden 73% atau 22 orang dan 7% responden telah mengatakan dana anggaran berjalan sangat baik serta 10% responden mengatakan tidak baik. Dana anggaran program KUBE ini langsung di transfer ke rekening perkelompok jadi peserta dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan kelompok.

Dana alokasi telah diberikan sesuai dengan seharusnya oleh pelaksana dengan baik, setiap periode dana Program PKH dan KUBE dapat berubah-ubah, hal ini sesuai hasil wawancara sebagai berikut:

“Alokasi anggaran untuk Program Kube ini memang selalu berubah-ubah. Begitu juga besaran dana bantuan untuk kelompok sasaran, biasanya bantuan dana ini mulai dari 10 juta- 20 juta, itupun kelompok tersebut harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang telah ditentukan”(Hasil Wawancara bersama Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana Kasim, SE 3 Maret 2014).

Alokasi untuk anggaran Program Keluarga Harapan juga ikut naik. RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang menerima bantuan PKH. Masih banyaknya RTSM yang tidak mendapat pendidikan dan kesehatan membuat Dinas Sosial Kabupaten Bantul terus berupaya memaksimalkan program kerja ini. Bertujuan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi kelompok masyarakat miskin, peserta PKH akan diberikan bantuan dana langsung

Tabel 3.18

Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Skenario Bantuan	Bantuan Per RTSM Per Tahun
Bantuan Tetap	Rp. 200.000,-
Bantuan Bagi RTSM yang memiliki;	
-Anak usia <6 Tahun	Rp. 800.000,-
-Bumil/Menyusui	Rp. 800.000,-
-Anak Usia SD/MI	Rp. 400.000,-
-Anak Usia SMP/MTs	Rp. 800.000,-
Bantuan Minimum per RTSM	Rp. 600.000,-
Bantuan Maksimum per RTSM	Rp. 2.200.00,-

Sumber : Buku Panduan PKH Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2012.

Menurut hasil wawancara tentang dana bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul 2012 yaitu sebagai berikut:

“Untuk anggaran yang tersedia bagi program PKH memang sangat minim dan belum cukup artinya untuk membantu RTSM di Kabupaten Bantul dana yang tersedia masih kurang sehingga besaran bantuannya pun dinilai masih kecil”. (Hasil wawancara bersama Rr. Rahayu Martiningtyas, SH. Kepala seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3 Maret 2014).

3. Disposisi (Sikap Pelaksanaan Program)

Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul telah mendapat sinyal yang cukup positif. Tanggapan yang baik dari masyarakat didorong karena sikap pelaksana dari program (Disposisi) tersebut. Dari hasil penelitian sikap pelaksanaan dalam hal ini yaitu Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul berjalan dengan cukup baik. Sikap pelaksanaan dari mulai proses menerima *Form* verifikasi

penerima bantuan program PKH berjalan dengan baik. Proses sosialisasi pendaftaran sampai dengan pencairan dana bantuan program KUBE juga berjalan dengan baik dan sesuai dengan payung hukum yang ada. Sikap pelaksana tim di lapangan telah sesuai jobdesk dan tufoksi masing-masing sehingga mampu menghindari terjadinya tumpang tindih dan *overlapping*. Selain itu pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi tim ini sendiri. Petunjuk lapangan telah diterapkan sehingga sikap pelaksana sesuai dengan petunjuk teknis dan lapangan.

Inisiatif dalam pelaksanaan program ini juga berjalan baik, karena target yang ditetapkan belum mencapai maksimal, maka inisiatif yang diambil oleh Tim pelaksana di lapangan baik itu dari Dinas Sosial maupun tim koordinator program PKH maupun tim pendamping melakukan kerja yang se-optimal mungkin. Bentuk inisiatif yang dilakukan oleh pegawai dan pihak ketiga bermacam-macam.

Dari hasil penelitian dan wawancara bersama ibu bersama Rr. Rahayu Martiningtyas, SH. Kepala seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai berikut (7 Maret 2014):

“inisatif ini berjalan cepat ketika ada laporan dari desa atau pedukuhan yang mengatakan ada RTSM yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan mendadak baik itu bentuk KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan korban kriminal, maka Dinas sosial Kabupaten Bantul segera mengirim tim untuk segera melakukan tindakan”.

Hal ini dilakukan agar RTSM yang membutuhkan pertolongan segera dapat di tindak lanjuti. Pertolongan ini dilakukan dengan perawatan

memang harus senantiasa siap melayani RTSM kapan saja, Dinas Sosial Kabupaten Bantul selalu berkoordinasi dengan tim dilapangan agar mereka selalu bekerja dengan sikap yang menjunjung tinggi nilai etika dan sopan santun.

Hasil wawancara bersama Rr. Rahayu Martiningtyas, SH. Kepala seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul terkait dengan inisiatif Tim Pendamping (7 Maret 2014).

”Dari hasil pengamatan kami di Dinas Sosial Kabupaten Bantul inisiatif dari sikap pelaksana baik di internal Dinas maupun eksternal dalam hal ini adalah tim dan pembimbing cukup baik. mereka bekerja sesuai SOP dan Jobdesk mereka masing-masing. Mereka juga tanggap”.

Sikap pelaksanaan program ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah pihak Kementerian Sosial (Kemensos). Dukungan yang di berikan pihak Kementerian Sosial adalah dengan melakukan seminar dan pelatihan. Di Kabupaten Bantul tim pelaksana program KUBE dan PKH baik itu koordinator maupun tim pendamping telah diberi arahan (*Training*) dan teknis lapangan saat pelatihan di Kabupaten/Kota se- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan sikap pelaksanaan menyangkut kedisiplinan mutlak diperlukan. Kedisiplinan disini termasuk kedisiplinan sumber daya manusia dan kedisiplinan pelaksanaan program ini. Kedisiplinan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan khususnya program KUBE dan PKH di Kabupaten Bantul sesuai jadwal yang telah ditentukan dan sudah sesuai dengan prosedur

yang tepat. Program pengentasan kemiskinan khususnya program Kelompok Usaha Bersama dan Program Keluarga Harapan telah dilaksanakan dengan sesuai jadwal, target dan harapan yang telah dirancang oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Dari sisi sumber daya manusia, kedisiplinan tetap diutamakan pegawai/petugas baik di tim pelaksana maupun Tim Pendamping dan Tim Ahli yang melakukan tugas dalam program-program pengentasan kemiskinan khususnya program KUBE dan PKH di jalankan dengan sikap yang disiplin. Tidak ada pegawai yang melanggar aturan yang telah ditentukan oleh ketua tim pelaksana. Namun tidak dapat dipungkiri karena minimnya sumber daya manusia dan panjangnya jam kerja membuat pegawai bekerja sangat keras dan membuat efektifitas terganggu. Sebagai contoh misalnya di Kecamatan Kasihan di temukan Tim pendamping yang jarang melakukan bimbingan dan konseling kepada RTSM yang membutuhkan. Hasil wawancara bersama Rr. Rahayu Martiningtyas, SH. Kepala seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul dikatakan bahwa, ada ditemukan kasus RTSM yang mengadu kepada Dinas Sosial karena keterlambatan mendapat bantuan dana kesehatan dan pendidikan padahal sudah pada waktunya. Kemudian di Kecamatan Srandakan ditemukan Tim Koordinator kurang memfasilitasi para peserta yang ingin mendaftar sebagai peserta program KUBE.

“Pada dasarnya kedisiplinan pegawai baik tim kecamatan, pendamping ahli dan dari internal Dinas Sosial sendiri sudah

cukup disiplin sesuai tugas dan bekerja secara profesional, namun tidak dapat dipungkiri kami kesulitan mengontrol kedisiplinan itu karena tim ini tersebar di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Bantul” (wawancara Rr. Rahayu Martiningtyas, SH. Kepala seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul).

Hasil penelitian kuesioner terkait sikap pelaksanaan pelayanan Program PKH telah berjalan baik kepada peserta.

Tabel 3.19

Sikap Pelaksana Terhadap Pelayanan Program PKH di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	14	47
2.	Baik	16	53
3.	Tidak baik	0	0
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data: Hasil Penelitian Tahun 2014.

Pada hasil ini dapat dilihat sikap pelayanan program pengentasan kemiskinan khususnya program PKH yang dilakukan oleh tim pelaksana dan penanggung jawab di Kabupaten Bantul berjalan dengan baik. Dari 30 responden 16 orang atau 53% mengatakan sikap pelayanan berjalan baik sedangkan 14 orang dengan persentase 47% mengatakan sangat

Tabel 3.20

Sikap Pelaksana Terhadap Pelayanan Program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bantul 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	9	30
2.	Baik	20	67
3.	Tidak baik	1	3
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data: Hasil Penelitian Tahun 2014.

Pada hasil *Tabel* diatas ini dapat dilihat sikap pelayanan program pengentasan kemiskinan khususnya program kelompok usaha bersama yang dilakukan oleh tim pelaksana dan penanggung jawab di Kabupaten Bantul berjalan dengan baik. Dari 30 responden 9 orang atau 30% mengatakan sikap pelayanan berjalan baik, sedangkan *persentase* 67% mengatakan sangat baik serta 3% mengatakan tidak baik. Hal tersebut terjadi karena koordinasi yang sangat baik dilakukan oleh pelaksana Tim Pembimbing dan Pendamping.

Sikap pelaksanaan oleh tim pelaksanan dan penanggung jawab program pengentasan kemiskinan khususnya KUBE dan PKH di Kabupaten Bantul dalam upaya melakukan pelayanan program baik bentuk pendampingan maupun bantuan langsung telah berjalan baik.

Hal lain dari sikap pelaksanaan adalah pemahaman pegawai atas sikap pelayanan dan tanggung jawab masing-masing tim dalam upaya melakukan pelayanan. Dari hasil kuesioner yang ada pemahaman

Tabel 3.21

**Pemahaman Tim Atas Sikap Pelaksanaan dan Pelayanan Serta
Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Program PKH
di kabupaten Bantul Tahun 2012.**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	13	43
2.	Baik	17	57
3.	Tidak baik	0	0
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil penelitian Tahun 2014.

Dari hasil ini menunjukkan bahwa, pemahaman pegawai atas sikap pelaksanaan serta tanggung jawabnya terhadap Program PKH sudah berjalan baik. Dari 30 responden, 17 responden diantaranya dengan *persentase* 72% mengatakan program tersebut berjalan baik, dan 13 responden atau 43% mengatakan sangat baik. Hasil ini tentunya berjalan dengan cita-cita yang sudah diharapkan, bagaimana terlihat pegawai yang melaksanakan program ini terlihat sangat baik.

Tabel 3.22

**Pemahaman Tim Atas Sikap Pelaksanaan dan Pelayanan Serta
Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha
Bersama di Kabupaten Bantul 2012.**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	10	33
2.	Baik	19	64
3.	Tidak baik	1	3
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil penelitian Tahun 2014.

Pada hasil ini dapat diketahui pemahaman pegawai atas sikap

pelaksanaan serta tanggung jawabnya terhadap Program Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) sudah berjalan baik yaitu, dapat dilihat dari *persentase* 64% mengatakan program tersebut berjalan baik, dan 10 responden atau 33% mengatakan sangat baik dan 3% mengatakan tidak baik.

Selain pemahaman tim dan pegawai atas sikap pelayanan, pemahaman atas pelayanan yang telah berjalan merupakan indikator sebuah keberhasilan implementasi sebuah program. Berikut hasil kuesioner terhadap pelaksanaan pelayanan program pengentasan kemiskinan khususnya program KUBE dan PKH.

Tabel 3.23
Pelaksanaan Pelayanan Program PKH
Di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	6	20
2.	Baik	24	80
3.	Tidak baik	0	0
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data: Hasil penelitian Tahun 2014.

Dari hasil koesioner tersebut, 80% responden mengatakan pelaksanaan pelayanan berjalan dengan baik dan 20% responden mengatakan pelaksanaan pelayanan berjalan dengan sangat baik.

Tabel 3.24
Pelaksanaan Pelayanan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	4	13
2.	Baik	24	80
3.	Tidak baik	2	7
4.	Sangat tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Dari hasil koesioner tersebut, 80% responden mengatakan pelaksanaan pelayanan berjalan dengan baik dan 13% responden mengatakan pelaksanaan pelayanan berjalan dengan sangat baik serta sisanya 7% responden mengatakan tidak baik.

Dari hasil ini terlihat bahwa proses pelayanan dalam upaya implementasi program PKH dan KUBE di Kabupaten Bantul Tahun 2012 telah berjalan dengan baik.

Masyarakat atau peserta penerima Program PKH memiliki sikap yang *variatif* dalam pelaksanaan tahap sosialisasi maupun tahapan pencairan dana bantuan. Dari hasil wawancara bersama ibu Rr. Rahayu Martiningtyas, SH. Kepala seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bantul (3 Maret 2014).

“saat dibuka pengajuan bantuan PKH ternyata ditemukan warga yang mengatakan dirinya sebagai RTSM padahal mereka tidak masuk dalam data dari BPS yang ada di dinas”.

Sikap masyarakat dalam proses Implementasi Program Pengentasan kemiskinan Program Keluarga Harapan dan Kelompok Usaha Bersama sebagai berikut :

Tabel 3.25

Sikap Timbal Balik Antara Pelaksana Dengan Peserta Program PKH di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	5	17
2.	Baik	25	83
3.	Tidak baik	0	0
4.	Sangat Tidak baik	0	0
	Jumlah	30	100

Dari hasil koesioner ini terlihat bahwa, sikap timbal balik antara masyarakat dengan pelaksana dalam pelaksanaan program PKH berjalan dengan baik. Sebagian besar responden mengatakan sikap masyarakat baik yaitu 83% atau 17 responden, dan responden yang mengatakan sangat baik 17%.

Tabel 3.26

Sikap Timbal Balik Antara Pelaksana dengan Peserta Program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	8	27
2.	Baik	17	56
3.	Tidak baik	5	16
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil Penelitian Tahun 2014.

Dari hasil koesioner ini terlihat bahwa, sikap timbal balik antara masyarakat dengan pelaksana dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama berjalan dengan baik. Sebagian besar responden mengatakan sikap masyarakat baik yaitu 57% atau 17 responden, dan responden yang mengatakan sangat baik 27% dengan 8 orang responden serta sisanya mengatakan tidak baik 16% dengan 5 orang responden.

Melihat hasil koesioner ini tentunya antara masyarakat dengan pelaksana telah terjalin hubungan yang baik tanpa ada masalah. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara bersama Rr. Rahayu

Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang respon serta sikap timbal balik masyarakat dengan pelaksana. (3 Maret 2014).

“Dalam beberapa kali kesempatan, dari tahap sosialisasi sampai penerimaan dana bantuan sikap masyarakat sangat membantu dan mendukung implementasi program pengentasan kemiskinan ini”,

Hal lain yang menggambarkan adalah konsistensi pelaksana terhadap Program PKH dan KUBE sebagai berikut :

Tabel 3.27
Konsistensi Pelaksana Atas Program PKH di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	8	27
2.	Baik	22	73
3.	Tidak baik	0	0
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil penelitian tahun 2014.

Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat dilihat bahwa, konsistensi pelaksana dalam implementasikan Program PKH di Kabupaten Bantul berjalan dengan baik. Sebagian besar responden yaitu 73% berjalan dengan baik dan 27% telah mengatakan konsistensi pelaksana berjalan sangat baik.

Tabel 3.28
Konsistensi Pelaksana Atas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	7	23
2.	Baik	22	74
3.	Tidak baik	1	3
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat dilihat bahwa, konsistensi pelaksana dalam implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2012 berjalan dengan baik suara responden 74% atau 22 orang dan 23% responden telah mengatakan konsistensi pelaksana berjalan sangat baik serta 3% responden mengatakan tidak baik.

Konsistensi yang baik membuat proses implementasi Program PKH dan KUBE telah berjalan tanpa hambatan serta respon yang tidak baik oleh masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan dengan hasil koesioner yang diberikan kepada peserta Program sebagai berikut:

Tabel 3.29

Kondisi Atas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul Tahun 2012.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	8	27
2.	Baik	22	73
3.	Tidak baik	0	0
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil penelitian tahun 2014.

Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat dilihat bahwa, konsistensi pelaksana dalam implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2012 berjalan dengan baik suara responden 73% atau 22 orang dan 27% responden telah mengatakan konsistensi pelaksana berjalan sangat baik.

Tabel 3.30

**Kondisi Atas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
di Kabupaten Bantul Tahun 2012.**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sangat baik	7	23
2.	Baik	22	74
3.	Tidak baik	1	3
4.	Sangat Tidak baik	0	0
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil penelitian tahun 2014.

Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat dilihat bahwa, konsistensi pelaksana dalam implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2012 berjalan dengan baik suara responden 74% atau 22 orang dan 23% responden telah mengatakan konsistensi pelaksana berjalan sangat baik serta sisanya 3% mengatakan tidak baik.

Melihat hasil ini tentunya hal ini selaras dengan penelitian di lapangan di mana masyarakat pada umumnya merespon baik atas pelaksanaan Program PKH dan KUBE. Hal ini juga berdasarkan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Respon masyarakat secara umum berjalan baik, hal ini terlihat saat tahap sosialisasi dan pendaftaran peserta karena mereka menganulir program ini sangat membantu dalam hal Kesehatan, Pendidikan serta pendapatan mereka”, wawancara dengan Ibu Murniati Wismandari Sub.Bag Umum Dinas Sosial Kabupaten Bantul 5 Maret 2014).

Sikap para implementor dalam pelaksana Program PKH dan KUBE di Kabupaten Bantul mempunyai peranan yang penting dalam

mempunyai kelengkapan dan untuk mengurangi angka kemiskinan di

Kabupaten Bantul. Hal ini karena adanya sikap yang baik dari pelaksana (implementor) menunjukkan komitmen yang besar untuk melaksanakan program ini dengan baik. Bila dilihat dari segi disposisi ini, telah terdapat kedisiplinan yang baik dari setiap pelaksanaan yang ada dalam kinerja Program PKH dan KUBE di Kabupaten Bantul tahun 2012. Hal ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan sehingga memiliki kapasitas dan kompeten serta *skill* dalam bidangnya masing-masing.

Dari hasil wawancara bersama Tim Pendamping Program Program Keluarga Harapan tentang konsistensi dan kedisiplinan.

“setiap tahun sekali kami telah mengikuti bimbingan teknis yang langsung diadakan oleh Kementerian sosial yang pastinya lebih membantu kami dalam hal kompetensi” (wawancara bersama ibu Rini Natalina, SP 3 Maret 2014).

4. Struktur Organisasi

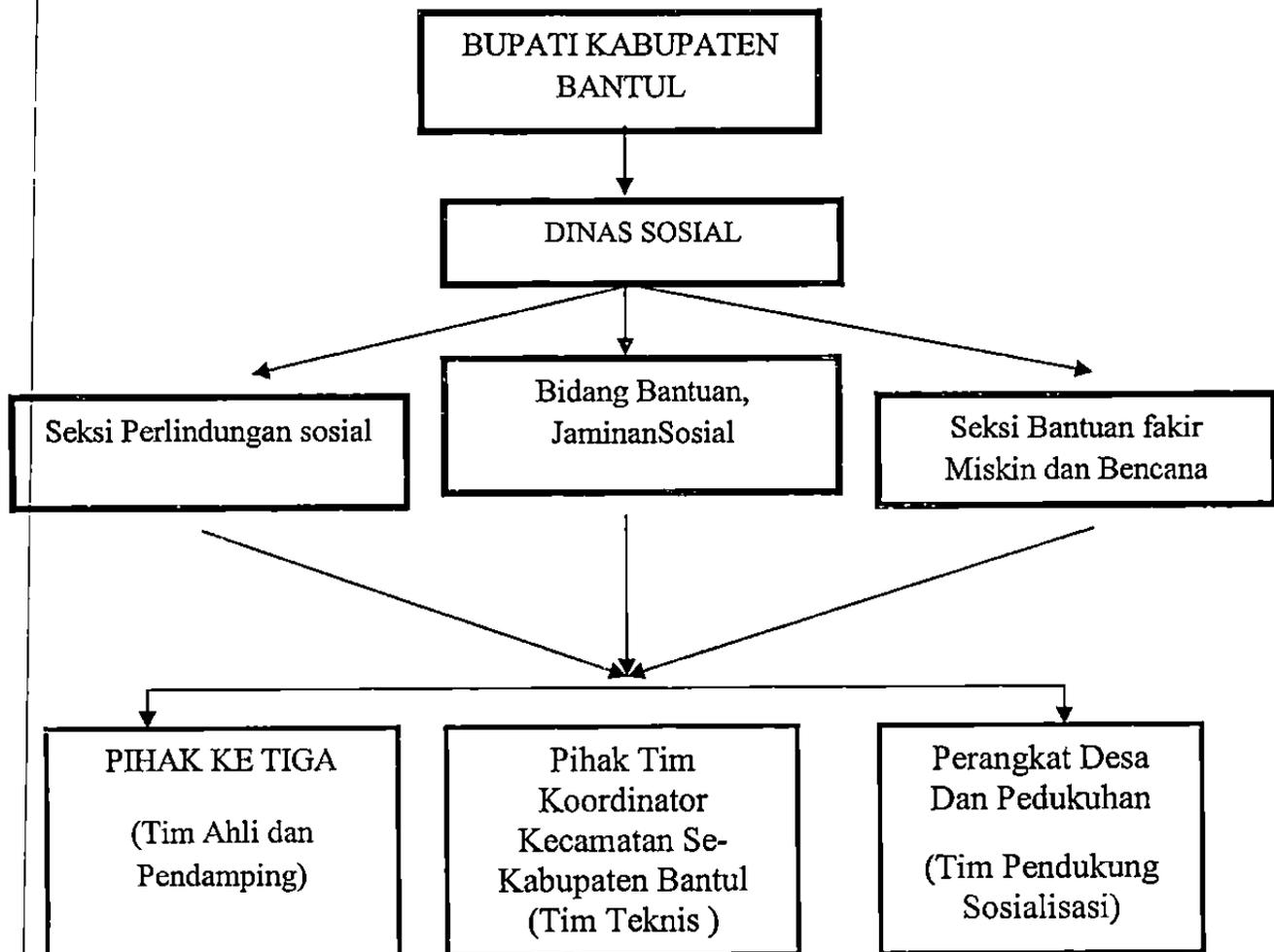
a) Standard Operation Prosedures (SOP) dan Fragmentasi

Dalam Implementasi suatu kebijakan dalam hal struktur birokrasi tidak akan terlepas dari adanya *Standart Operating Procedures* (SOP) dan *fragmentation*. Sebetulnya, Implementasi pengentasan kemiskinan merupakan kebijakan tingkat nasional. Mengacu kepada SOP yang berasal dari pusat tentunya struktur organisasi-organisasi badan pelaksana yang melaksanakan kebijakan mempunyai peranan penting dalam implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja seperti SOP. Standarisasi ini digunakan untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pelaksana (implementor)

Instansi pelaksana dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan Kabupaten Bantul meliputi Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Tim koordinator di Kabupaten Bantul, Tim Pendamping. Bentuk kerja sama antar lembaga yang terjadi dalam program pengentasan kemiskinan ini adalah adanya kerja sama antara Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan Tim Pendamping. Berikut alur struktur birokrasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul :

Gambar 3.2

Alur Struktur Birokrasi Program Pengentasan kemiskinan khususnya Program KUBE dan PKH di Kabupaten Bantul



Struktur birokrasi yang ada sudah efisien, tidak *overload* ataupun tumpang tindih tugas, apa lagi melibatkan pihak ketiga. Hal ini karena setiap aparat pelaksana telah mengerti dengan tugasnya masing-masing dimana disetiap struktur birokrasi aparat pelaksananya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan sesuai dengan yang diperintahkan atasan. Hal ini dibuktikan di lapangan dengan adanya kelancaran mulai dari proses sosialisasi sampai proses pencairan bantuan program KUBE dan PKH, walaupun ada sedikit kekurangan. Pelaksana (implementor) pelaksananya dibentuk sesuai dengan ketentuan yang ada.

“kami menyadari kalau program pengentasan kemiskinan ini sangat urgen dan penting, oleh karena itu kami melakukan kerja sama bersama pihak ketiga dalam hal ini agar lebih memudahkan program-program yang sudah kami formulasikan. Di lapangan juga kami selalu berkoordinasi dengan struktur organisasi yang ada sehingga tidak ada terjadinya tumpang tindih.” (Wawancara Bersama Bapak Kasim,SE)

Alur struktur organisasi yang dipakai dalam implementasi program pengentasan kemiskinan ini berdasarkan peraturan bupati dan pedoman kestrukturan organisasi pemerintah daerah. Struktur organisasi yang binangun Kabupaten Bantul bila dilihat pada prinsip efektifitas dan efisiensi organisasi telah sangat baik tidak tumpang tindih dan berlebihan sehingga inefisiensi. Struktur organisasi dalam hal ini adalah struktur organisasi implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan Kabupaten Bantul yang tentunya di wakili oleh Bupati Bantul sebagai pihak regulator, berikutnya turun kepada Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana baik regulasi maupun teknis, khususnya Bidang Jaminan dan Bantuan

Sosial dalam penerapannya agar lebih efektif kemudian dibentuk kembali satu tim koordinator, yaitu pihak ketiga dan Tim Ahli seperti LSM serta Pedukuhan desa sebagai pendamping sosialisasi.

Alur organisasi yang dimulai dari bupati sampai tim pelaksana berjalan (*Buttom Up and Top down*). Namun struktur birokrasi juga ditambahkan seperti kepada birokrasi terbawah yaitu perangkat desa, pedukuhan RT dan RW. Selain itu yang masih masuk dalam tanggung jawab yang meliputi Dinas Sosial adalah pembentukan Tim Pembantu dari pihak ketiga dan beberapa LSM.

B. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul

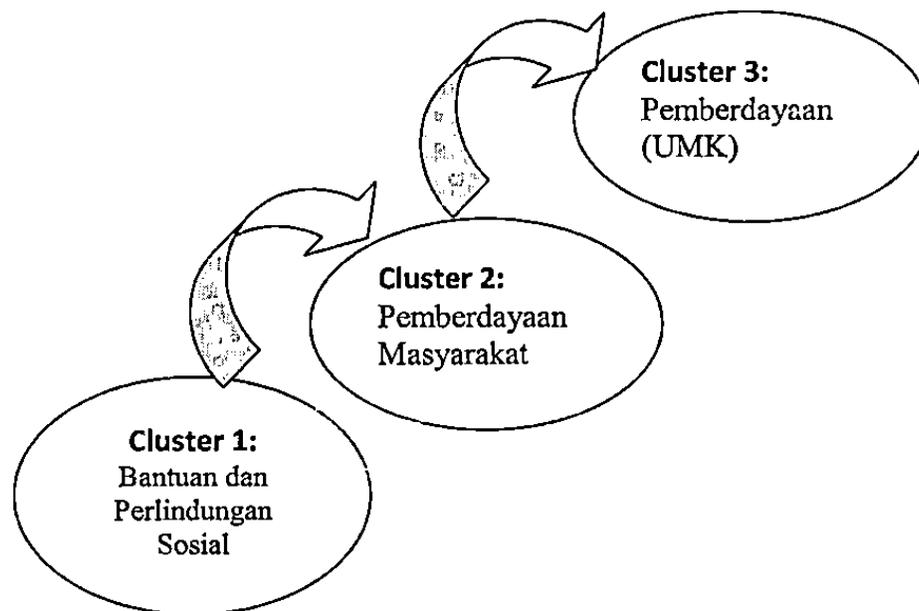
1. Hasil Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa hasil terkait bagaimana proses implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul tahun 2012 khususnya pada program Kelompok Usaha Bersama dan Program Keluarga Harapan. Dari proses awal implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan sudah terkonsep dengan baik sesuai dengan intruksi dari Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Sosial. Kebijakan ini mulai dari sebuah paradigma dari pola pengentasan kemiskinan yaitu “diberi ikan, kemudian di ajari memancing

Dari cara atau *cluster* ini yang dimaksudkan pemerintah, kebijakan pengentasan kemiskinan dijalankan secara berkesinambungan artinya, RTSM diberikan dana bantuan dan pelatihan serta bimbingan untuk mengaplikasikan atau menyalurkan keterampilan yang telah di fasilitasi oleh pemerintah. Berikut ini adalah pola cluster yang coba diterapkan oleh Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Bantul :

Gambar 3.3

Cluster Pengentasan Kemiskinan



Sumber : Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan Kementrian Sosial tahun 2012.

Dari *cluster* tersebut kemudian pemerintah Kabupaten Bantul

menyediakan menjadi beberapa paket program, seperti PKH dan KUBE

Dalam penelitian ini, akan menelaah secara mendalam yaitu Program Kelompok Usaha Bersama dan Program Keluarga Harapan. Hasil yang diteliti ini juga merupakan bagian dari empat indikator penelitian. Berikut ini adalah hasil dari implementasi program KUBE dan PKH :

a. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Program pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan sosial fakir miskin dengan jalan pemberian bantuan penguatan modal usaha untuk memfasilitasi kelompok fakir miskin dalam mengelola Usaha ekonomi Produktif (UEP) dan meningkatkan aktifitas sosial kelompok, disalurkan dengan mekanisme bantuan langsung dengan sistem cash transfer melalui PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salah satu *icon* Kementerian Sosial dalam penanganan masalah kemiskinan.

Setiap kelompok memiliki anggota 10 KK, Anggota berusia produktif (15-55 tahun) dan sudah berkeluarga, telah memiliki kegiatan sosial dan usaha ekonomi produktif, diutamakan KUBE yang memiliki pembukuan / catatan keuangan serta diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bila dilihat dari gambar Cluster di atas karena KUBE merupakan usaha pengentasan kemiskinan *cluster* ke-3 yaitu pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE di Kabupaten Bantul Tahun 2012, dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 2) Undang -- Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi , Pemerintahan Kabupaten/ Kota.
- 5) Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- 6) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 84/ HUK/ 1998 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin. (Sumber: Laporan Pelaksanaan PKPD melalui KUBE Tahun 2012).

Lokasi penumbuhan KUBE FM tahun 2012 di Kabupaten Bantul sebanyak 85 KUBE yaitu KUBE perdesaan dan perkotaan.

KUBE Penumbuhan perdesaan Klasifikasi Perdesaan sebanyak 65 Kelompok yang meliputi:

- 1) Kecamatan Pleret sebanyak 5 kelompok yang terdiri dari :

a) Desa Bayung sebanyak 5 kelompok

- 2) Kecamatan Srandakan sebanyak 5 kelompok yang terdiri dari :
 - a) Desa Poncosari sebanyak 20 kelompok
 - b) Desa Trimurti sebanyak 20 kelompok
- 3) Kecamatan Imogiri sebanyak 5 kelompok yang terdiri dari :
 - a) Desa Wukirsari sebanyak 5 kelompok
- 4) Kecamatan Dlingo sebanyak 15 kelompok yang terdiri dari :
 - a) Desa Jatimulyo sebanyak 5 kelompok
 - b) Desa Muntuk sebanyak 5 kelompok
 - c) Desa Mangunan sebanyak 5 kelompok

KUBE Penumbuhan Klasifikasi Perkotaan sebanyak 20 Kelompok yang seluruh KUBE ada di Kecamatan Sewon yang terdiri dari :

- 1) Desa Timbulharjo sebanyak 5 kelompok
- 2) Desa Bangunharjo sebanyak 15 kelompok

Namun, di beberapa kecamatan program KUBE cukup tersendat diantaranya Kecamatan Pandak dan Pundong. Di dua kecamatan ini KUBE dirasa belum optimal karena sampai saat ini ditemukan hanya 2-3 KUBE yang aktif dan produktif, dan pertumbuhan setiap tahunnya pun kurang memadai dikisaran 4-7 %. Dari hasil penelitian di dua kecamatan ini KUBE belum optimal karena memiliki beberapa kendala seperti lemahnya kemampuan SDM di tingkat desa,

Secara keseluruhan dari program KUBE dari catatan Dinas Sosial Kabupaten Bantul setidaknya dapat mengurangi angka kemiskinan. Dari KUBE di setiap kecamatan se-Kabupaten Bantul mampu memperkerjakan 15-20 orang, yang itu sebagian besar adalah RTSM. Sampai saat ini setidaknya dari KUBE ini telah menyerap tenaga kerja berkisar 4000-8000 pekerja setiap tahun.

Omset dari satu KUBE dari data kami himpun apabila KUBE tersebut produktif berkisar 200 juta -500 Juta pertahun. Seperti contohnya KUBE Lembu Santoso dari Wonorejo II Gadingsari Sanden Bantul meraih juara peringkat I Tingkat Propinsi DIY dalam seleksi KUBE dan Pendamping KUBE Prestasi Tingkat Propinsi. (*Wawancara : bersama ibu Murniati Wismandari Sub.Bag Umum Dinas Sosial Kabupaten Bantu 21 Oktober 2013*).

Tabel 3.31

Pertumbuhan KUBE

No	Kecamatan	Jumlah KUBE Th.2009-2010			Jumlah KUBE Th.2011-2012		
		2009	2010	Kenaikan	2011	2012	kenaikan
1.	Srandakan	-	-	-	-	40	-
2.	Sanden	-	25	-	-	-	-
3.	Kretak	-	-	-	30	-	-
4.	Pundong	-	-	-	30	-	-
5.	Bb.lipuro	-	-	-	-	-	-
6.	Pandak	-	25	-	-	-	-
7.	Bantul	-	-	-	-	-	-
8.	Jetis	-	-	-	-	-	-
9.	Imogiri	55	-	-	-	5	5
10.	Dlingo	-	-	-	-	15	-
11.	Pleret	-	-	-	-	5	-
12.	Piyungan	-	30	-	-	-	-
13.	Banguntapan	25	-	-	-	-	-
14.	Sewon	-	-	-	-	20	-
15.	Kasih	45	-	-	-	-	-
16.	Pajangan	-	-	-	30	-	-
17.	Sedayu	-	-	-	-	-	-
Jumlah		130	80	-	90	85	5

Dari tabel pertumbuhan KUBE di atas, mulai tahun 2009-2012 jelas terlihat ada peningkatan dan penurunan jumlah kelompok. Pertumbuhan ini dikarenakan ada minat masyarakat khususnya RTSM yang tinggi untuk mengikuti program KUBE ini. Selain itu peran pemerintah yang optimal untuk kemudian membina dan membentuk KUBE membuat ada angin segar untuk mengangkat perekonomian RTSM melalui UMK. Secara garis besar setiap kecamatan di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dan penurunan kelompok usaha, walaupun besarnya berbeda. Di Kecamatan Imogiri terjadi peningkatan paling besar diantara kecamatan yang ada. Di kecamatan Imogiri ini kelompok usaha baru dari tahun 2009-2012 yaitu tumbuh sampai 5 kelompok KUBE.

KUBE yang merupakan sebuah kelompok usaha bersama memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian warga khususnya RTSM. Di Bantul sendiri bentuk KUBE bermacam-macam, seperti kelompok usaha, peternak sapi, peternak kambing, penyewaan alat tenda, pengolahan kayu, usaha kusen, pengolahn peternakan bebek dan lain-lain. Data yang dihimpun Dinas Sosial menunjukkan 56 % bentuk KUBE yang dikembangkan di Kabupaten Bantul adalah pada sektor peternakan, kemudian disusul sector produksi kayu 22 %, kemudian pada sector pengolahan makanan 12, kemudian pengolahan jasa sebesar 10 %

KUBE yang merupakan sebuah kelompok usaha bersama memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian warga khususnya RTSM. Di Bantul sendiri bentuk KUBE bermacam-macam, seperti kelompok usaha, peternak sapi, peternak kambing, penyewaan alat tenda, pengolahan kayu, usaha kusen, pengolahan peternakan bebek dan lain-lain. Data yang dihimpun Dinas Sosial menunjukkan 56 % bentuk KUBE yang dikembangkan di Kabupaten Bantul adalah pada sektor peternakan, kemudian disusul sector produksi kayu 22 %, kemudian pada sector pengolahan makanan 12, kemudian pengolahan jasa sebesar 10 %.

Tabel 3.32

Sektor UMK KUBE

Bentuk Usaha	Jenis	Porsentase
Peternakan dan Pertanian (Sapi, Kambing, Itik, Lele, Jamur dll)	Produksi	56%
Produksi kayu (Kusen, jasa pemotongan)	Produksi dan jasa	22%
Produksi makanan ringan	Produksi	12%
Penyewaan Tenda, perlengkapan Sound system	Jasa	10%

Sumber : Sub.Bag umum Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2012.

Dari hasil yang penelitian ditemukan bahwa Program KUBE ini sangat baik dan sangat membantu meningkatkan perekonomian RTMS. Berdasarkan keterangan dari Dinas Sosial rata-rata KUBE dapat memberikan kontribusi peningkatan ekonomi bagi RTSM yang ada di Kabupaten Bantul sebesar 4-7%. Dengan itu secara otomatis

tingkat pendapatan RTSM yang aktif dalam KUBE dikisaran

Rp.980.000 - Rp.1.087.000 Per Bulan. Bukanya hanya itu dari KUBE juga telah secara jelas memberikan kontribusi bagi PAD di setiap desa dimana KUBE itu dilaksanakan. Oleh karena itu melihat dari kondisi lapangan dan kerja keras serta sinergi semua *stakeholder* program ini dirasakan cukup baik untuk mengentaskan kemiskinan.

b. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM, sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan). Adapun tujuan dari PKH ini sendiri adalah pertama, mengurangi kemiskinan kedua, meningkatkan kualitas SDM kelompok masyarakat miskin. Jika dilihat PKH ini merupakan *Cluster* pertama bersama Raskin, Jamkesmas, Beasiswa untuk siswa miskin termasuk juga program bantuan sosial untuk penyandang cacat, lansia, anak-anak terlantar dan komunitas adat terpencil. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin, ditujukan untuk mempercepat pencapaian tujuan *Millenium Development Goals (MDGs)* yang banyak didengungkan di seluruh dunia pada tahun 2007. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global tentu saja harus mampu mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, yaitu :

- 2) meningkatkan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- 3) kesetaraan gender;
- 4) penanggulangan angka kematian bayi dan balita; dan
- 5) penurunan angka kematian ibu melahirkan.

Dimulai tahun 2007 Program Keluarga Harapan (PKH) akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan, dimana bantuan yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan yang dikaitkan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Untuk jangka pendek bantuan ini akan membantu beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjangnya adalah bantuan dengan mensyaratkan keluarga penerima menyekolahkan anaknya ke sekolah dasar dan lanjutan (SD s.d. SLTP), melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil dan perbaikan gizi. Dengan PKH diharapkan RTSM penerima bantuan memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin sehingga mereka mampu berfungsi secara sosial yang pada akhirnya rantai kemiskinan dapat diputus. Adapun penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak

SLTP, dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Semakna dengan amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 3 yang berbunyi "*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*", maka PKH harus bisa membuktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai wujud nyata dari UUD 45 pasal 34 ayat 3. Dari sisi kebijakan sosial PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat, khususnya bagi RTSM yang diwajibkan memeriksakan kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk meyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku RTSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan. Kelak diharapkan perubahan perilaku tersebut akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah RTSM yang bekerja yang sekaligus akan menjadi tantangan utama bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin dimanapun mereka berada.

Pada tahun 2007 PKH telah banyak membantu kualitas pendidikan dan kesehatan RTSM. Bantuan PKH berupa uang tunai (cash) yang digunakan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Yang berhak menerima PKH ini adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak berusia 0-15 tahun dan /ibu hamil/nifas. Selain itu juga bantuan yang diterima disalurkan kepada ibu/wanita dewasa yang mengurus anak pada RTSM itu sendiri. Peserta PKH

tidak menutup kemungkinan keikutsertaan pada RTSM pada program lain seperti (BOS, ASKESKIN, RAKIN).

Program ini merupakan salah satu item dari semua program untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bantul. Terhitung dari tahun 2008 peserta PKH yang menerima terus bertambah secara signifikan. Penambahan ada disetiap 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Program Keluarga Harapan (PKH) memang difungsikan untuk membatu RTSM agar tetap sehat dan dapat bersekolah. Sejak tahun 2008-2012 terhitung rata-rata setiap tahun bantuan PKH ini diberikan kepada 853-3164 orang di Kabupaten Bantul, berikut peserta PKH tahun 2011-2012:

Tabel 3.33
Jumlah Peserta PKH Tahun 2011 dan 2012

Kecamatan	Jumlah Peserta	
	2011	2012
Srandakan	226	212
Sanden	153	142
Kretek	51	48
Pundong	248	235
Bb.lipuro	277	262
Pandak	441	120
Bantul	244	231
Jetis	153	142
Imogiri	167	159
Dlingo	102	96
Pleret	143	136
Piyungan	154	146
Banguntapan	354	339
Sewon	150	139
Kasih	178	169
Pajangan	158	152
Sedayu	142	136
Jumlah	3341	3164

Dari tabel 3.33 dapat dilihat PKH yang disalurkan kepada RTSM, di Kabupaten Bantul sangat bervariasi di setiap Kecamatan Kabupaten Bantul. Pada tahun 2011 ada 3341 RTSM yang mendapat bantuan dana PKH dan 2012 sebesar 3164 sehingga terjadi penurunan sekitar 177 RTSM yang menerima.

Kecamatan yang paling besar menerima PKH pada tahun 2012 adalah Kecamatan Banguntapan dengan total RTSM sebesar 339 kemudian disusul Kecamatan Bambang Lipuro dengan 262 RTSM, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kretek dan Dlingo dengan 48 dan 96 RTSM. Hasil wawancara bersama Pembina Program PKH, sebagai berikut:

“Untuk PKH alhamdulillah pada tahun 2012 kemarin kami telah meyalurkan kurang lebih 3164 Kepada penerima RTSM, dan turun 177 dibanding dengan Tahun 2011, artinya program ini mampu mengurangi pengentasan kemiskinan dari bidang pendidikan dan kesehatan. Kami harap angka ini terus turun karena itu artinya semakin tinggi pengurangan angka kemiskinan yang ada”(Wawancara Rr. Rahayu Martiningtyas, SH. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantu 5Maret 2014).

Program PKH ini ternyata juga terdapat banyak kendala dimana sering kali ditemukan bantuan yang diterima tidak digunakan secara tepat sasaran. Menurut hasil wawancara bersama Staf Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai berikut:

“Ya, Kami menyadari bahwa bantuan PKH ini terkadang kurang tepat sasaran, walaupun telah diberikan kepada ibu dari anak-anak mereka, mungkin ini merupakan dampak kebutuhan hidup semakin mahal sehingga mereka mengalikan bantuan

meningkat dari 57,91% menjadi 58,72% di Tahun 2012. Jenjang tingkat SD/MI/Paket A dari 92,39% menjadi 105,05% di Tahun 2012 dan jenjang SMP/MTS dari 87,98% meningkat sebesar 91,31% di Tahun 2012.

Dilihat dari pencapaian yang selama ditargetkan pada Program Keluarga Harapan (PKH) maka kinerja Dinas Sosial telah dianggap cukup baik, baik dalam hal manajemen organisasi maupun penerapan kebijakan. Hal ini dilihat dari hasil program yang mampu meningkatkan ekonomi RTSM dan meningkatkan di bidang kesehatan, pendidikan serta mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi RTSM yang kemudian mampu memutus tali atau rantai kemiskinan. Selain itu kinerja organisasi yang dijalankan sudah cukup baik dimana komunikasi, pengolahan Sumberdaya, dispoisi dan struktur organisasi berjalan seiring seirama. Hasil wawancara dengan Tim Pendamping Program PKH sebagai berikut:

“Walaupun belum menurunkan angka kemiskinan yang sangat signifikan namun, Program PKH sudah berhasil memutus rantai kemiskinan dengan tingkat kesehatan dan pendidikan yang lebih baik daripada tahun awal dibentuknya program ini di Kabupaten Bantul”. (wawancara bersama Pendamping program PKH Pini Natalina SP 7 Maret 2014)